



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 778/VII/2013

11/JULI 2013



BURUH MENUNTUT:  
TOLAK RUU ORMAS  
BURUH MENUNTUT:  
RUU ORMAS MENGANCAM PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA  
BURUH MENUNTUT:

## Paripurna DPR Setujui RUU Ormas Dengan Mekanisme Voting



# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JULI 2013

Minggu kedua bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 2 Juli. Selain itu, dilaporkan mengenai perkembangan pembahasan fungsi legislasi Dewan. Berikut rangkumannya:

## Rapat Paripurna 2 Juli 2013

Rapat Paripurna ini memiliki tiga agenda. Pertama; Laporan Komisi I DPR mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, Kedua ; Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Pembahasan Penggantian Antar Waktu jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, Ketiga; Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Agenda Pertama didahului dengan laporan Komisi I mengenai Hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP yang telah dilakukan pada rapat komisi, dengan hasil telah dipilih 7 anggota KIP periode 2013-2017, dengan nama-nama sebagai berikut: (1) Ir. Abdul Hamid Dipopramono M.Si (2) Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H (3) Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H (4) Dra. Henny S Widyaningsih, M.Si (5) John Fresly, S.H., LL.M (6) Dr. Rumadi, MA (7) Yhannu Setyawan, S.H., M.H. Komisi juga memutuskan empat calon anggota KIP PAW yang akan diambil dari urutan berikutnya apabila terjadi kekosongan, yang namanya sebagai berikut; (1) Wahyu Kuncoro, S.IP., M.Si, M.IP (2) Dr. Halomoan Harahap, M.Si. (3) Juniardi, S.IP., M.H (4) Dra. Tiurma Mercy Sion Sihombing. Atas laporan komisi I tersebut, rapat paripurna memberikan persetujuan dan selanjutnya DPR akan menyampaikan surat kepada Presiden, menyampaikan tujuh nama calon untuk mendapatkan penetapan Presiden menjadi anggota KIP periode 2013-2017.

Agenda kedua adalah penetapan Penggantian Antar

## Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Waktu (PAW) BPK. Dalam rapat paripurna, Pimpinan Komisi XI telah menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan calon PAW Anggota BPK RI sebagai pengganti saudara Taufiqurrahman Ruki yang telah mengakhiri masa tugasnya karena pensiun. Melalui uji kepatutan dan kelayakan, dari 22 calon akhirnya Komisi menetapkan bahwa saudara Agus Joko Pramono, S.ST., Ak., M.Acc terpilih dengan 42 suara. Dengan demikian, saudara Agus Joko Pramono menggantikan saudara Taufiqurrahman Ruki. Atas laporan Komisi XI ini, rapat paripurna memberikan persetujuan, dan segera menyampaikan surat kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

Agenda ketiga adalah pembicaraan tingkat II/ Pengambilan keputusan tentang RUU Organisasi Kemasyarakatan. Ketua sidang paripurna melaporkan bahwa pembicaraan tingkat II ini dilakukan pada tanggal 2 Juli sebagai tindak lanjut keputusan sidang

paripurna tanggal 25 Juni, bahwa pengambilan keputusan ditunda selama satu minggu karena diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Pansus. Disamping itu dalam hari-hari penundaan, Pansus juga melakukan sosialisasi dengan Pengurus Besar NU, Pengurus Besar Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Atas masukan dari Ormas-ormas tersebut dan konsultasi yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan dengan Pansus dan Pimpinan Fraksi, maka telah dilakukan penyempurnaan beberapa materi RUU. Ketua Pansus selanjutnya melaporkan hasil penyempurnaan atas revisi RUU kepada rapat paripurna.





Revisi yang dilakukan antara lain pada beberapa pasal, yaitu pasal 7; Bab IX pasal 35; Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3; pasal 52 huruf D; Pasal 59 ayat 1 huruf A; Pasal 59 ayat 5; Pasal 65 ayat 3; dan pasal 83 huruf B. Pimpinan rapat Paripurna selanjutnya menawarkan kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan/ tidak memberikan persetujuan atas RUU Ormas yang telah mengalami penyempurnaan. Karena masih ada berbagai pendapat, maka akhirnya rapat Paripurna mengambil keputusan atas dasar voting/ suara terbanyak yang hasilnya adalah sebagai berikut: [1] menerima RUU Ormas untuk disahkan menjadi UU dengan jumlah 311 suara dari 6 Fraksi, yaitu F-Partai Demokrat, F-Partai Golkar, F-PDIP, F-PKS, F-PPP, F-PKB. [2] Sedangkan yang menolak ada 50 anggota, terdiri dari F-PAN, F-Gerindra dan F-Hanura.

Dalam konsideran dari RUU ini, disebutkan bahwa (1) kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, bagian dari HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 45. (2) Bahwa dalam menjalankan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tiap orang wajib menghormati Hak Asasi dan Kebebasan orang lain, dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Bahwa dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ormas berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila. (4) Bahwa UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu diganti.

Sambutan Presiden yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa Ormas yang terdaftar pada instansi Pemerintah sebanyak 139.957 organisasi, dengan rincian yaitu terdaftar pada Kemendagri 65.577, terdaftar pada Kemensos 25.406, terdaftar pada Kemenkumham 48.866 dan ormas asing yang terdaftar pada Kemenlu sebanyak 108 organisasi. Jumlah tersebut belum termasuk ormas yang hingga saat ini belum terdaftar pada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah memiliki paradigma yang sama dengan DPR, yang menempatkan Ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Ormas merupakan aset bangsa dan potensi kekuatan masyarakat yang harus di kelola, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika Ormas, serta dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi, maka Pemerintah menyambut baik adanya usul inisiatif DPR untuk merevisi UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena sudah tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 yang telah empat kali dilakukan amandemen. Perubahan UU ini sejalan de-

ngan arah reformasi dalam rangka membangun sistem tata kelola organisasi yang baik, sehat, mandiri, profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD-N 1945.

### Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam masa sidang ke empat, beberapa RUU telah dan akan disahkan menjadi UU. RUU yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU yaitu, (1) RUU Ormas, yang merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Prolegnas 2013. (2) RUU tentang APBN-P 2013, yang merupakan RUU Kumulatif terbuka dan satu RUU lagi yaitu (3) RUU pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, yang merupakan RUU daerah otonomi baru. RUU lain yang akan segera diselesaikan adalah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; RUU tentang Desa dan RUU tentang Keantariksaan. Beberapa RUU masih akan dilanjutkan pembahasannya, walaupun sudah mengalami beberapa kali perpanjangan, yaitu RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang KUHP, RUU KUHP, RUU Kejaksaan, RUU tentang Mahkamah Agung, RUU tentang Pilkada, RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Kepalangmerahan, RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Pertanahan dan beberapa RUU lainnya. Diharapkan RUU ini pada masa sidang ke I yang akan datang, dapat segera diselesaikan.

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga masih dalam proses pembahasan di Komisi III. RUU KUHP ini diharapkan menjadi karya besar anak bangsa. Sebab selama ini bangsa Indonesia masih menggunakan KUHP warisan Kolonial Belanda. Sementara, KUHP sebelumnya sudah berlaku hampir 32 tahun, kini dirasakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan KUHP baru yang dapat mengantisipasi berbagai kekosongan hukum yang ada.

### Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam minggu ini, Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014 dan RKP 2014 masih terus berlangsung di Badan Anggaran DPR RI. Untuk efisiensi dan efektifitas pembahasan, Badan Anggaran telah membentuk empat panitia kerja/Panja yang akan melaksanakan tugasnya secara paralel, dengan masing-masing terdiri dari dua Panja, yaitu: [1] Tanggal 24-27 Juni 2013, Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2014 dan Panja RKP 2014 dan prioritas anggaran; [2] Tanggal 27 Juni 2013, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah. [3] Tanggal 10 Juli 2013, penyampaian laporan Panja dalam rapat kerja. [4] Hasil pembahasan di Banggar dengan Pemerintah dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna 12 Juli 2013.

Pembahasan Laporan Realiasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2013. Dijadwalkan tanggal 8 Juli 2013 Pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2013 dalam Rapat Kerja. Pembahasan laporan semester 2013 ini akan dilakukan oleh Panja Perumus Kesimpulan, dan dilaporkan dalam rapat kerja tanggal 10 Juli 2013.

Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (RUU P2 APBN 2012). Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, Pasal 162 menyatakan bahwa “pembahasan dan penetapan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK ke DPR”. \*\*\*

## Paripurna DPR Setujui RUU Ormas Dengan Mekanisme Voting



Anggota DPR RI sedang melakukan Voting pengambilan keputusan RUU Ormas.

**Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Taufik Kurniawan Selasa (2/7) akhirnya menyetujui RUU Ormas dengan mekanisme voting. Dengan rincian sebagai berikut, 311 anggota Dewan menyetujui, sementara 50 orang menolak RUU Ormas tersebut. Pengambilan keputusan atas RUU ini sempat tertunda selama sepekan, semula dijadwalkan tanggal 25 Juni 2013.**

Berdasarkan hasil voting, maka yang menyetujui RUU Ormas yaitu, Partai Demokrat 107, FPG 75 orang, PDIP 62 orang, PKS 35 orang, PPP 22 orang, PKB 10 orang dengan total 311 orang anggota Dewan. Sementara PAN 26 orang, Gerindra 18 orang, dan Hanura 6 orang maka total 50 orang menolak RUU Ormas tersebut.

Menurut Nurhasan Zaidi dari PKS, tidak semua Ormas menolak RUU tersebut, bahkan hanya segelintir yang menolak. “RUU ini sepertinya dipersiapkan akan berlaku represif sebetulnya pasal ini tidak menghambat kebebasan berserikat,” ujarnya.

Dia menambahkan, RUU Ormas telah mengakhiri rezim perundang-

undangan yang lama yang cenderung represif. “Karena itu sudah seharusnya disetujui dan anggota Pansus sudah sangat akomodatif mendengarkan semua pihak,” tambahnya.

Sementara itu anggota DPR Tritanto dari Fraksi PDIP meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait RUU Ormas agar tidak terjadi



misinformasi terhadap RUU itu.

“Kita paham adanya penundaan paripurna tersebut, karena itu harus segera diambil kesepakatan bersama hari ini, namun pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Pansus telah melakukan sosialisasi, sinkronisasi isi dan unsur yang terlibat didalam RUU Ormas tersebut. Selain itu, RUU tersebut juga diikuti oleh sembilan Fraksi di DPR RI.

Anggota DPR Martin Hutabarat (Fraksi Partai Gerindra) mengatakan, prinsipnya UU harus memiliki manfaat bagi masyarakat banyak. “Kita mengharapkan jangan sampai DPR membuat UU tidak dapat diimplementasikan, karena itu perlu dilakukan pendekatan dengan Ormas terbesar lagi,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Martin, Gerindra meminta diberikan waktu tambahan untuk berdialog dengan masyarakat. “Kita minta RUU Ormas ditunda,” tambahnya.

#### Sejalan Reformasi:

Pemerintah menyambut baik usul inisiatif DPR melakukan perubahan terhadap UU No.8/1985 tentang Or-

ganisasi Masyarakat (Omas) karena sejalan dengan arah reformasi dalam membangun sistem tata kelola organisasi yang baik, sehat, mandiri, profesional, transparan dan akuntabel sesuai prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Demikian ditegaskan Mendagri Gamawan Fauzi di depan Sidang Paripurna DPR Selasa (2/7) siang, se usai pengambilan keputusan atas RUU Ormas. Menurut Mendagri, ormas yang terdaftar di Kemendagri sebanyak 65.557 ormas, terdaftar pada Kemensos 5.406 ormas, di Kemenkumham 48.886 ormas dan ormas asing yang terdaftar di Kemenlu 108 ormas.

Menurutnya, jumlah tersebut belum termasuk ormas yang hingga saat ini belum terdaftar pada pemerintah maupun pemerintah daerah. “Pemerintah memiliki paradigma yang sama dengan DPR dengan menempatkan ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan mewujudkan cita-cita nasional,” ungkapnya.

Ormas lanjut Gamawan Fauzi, merupakan aset bangsa, berpotensi sebagai kekuatan masyarakat yang perlu dikelola agar memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mempertim-

bangkan dinamika dan perkembangan ormas serta memantapkan kehidupan demokrasi maka melalui inisiatif DPR UU No. 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan, dirasa perlu dilakukan perubahan dan penggantian karena tidak sesuai lagi dengan UUD 45 yang telah empat kali dilakukan perubahan.

Pembahasan RUU Ormas telah dilakukan sejak tahun 2011 dalam suasana yang sangat dinamis, penuh semangat, terbuka, kekeluargaan dan saling menghargai dan tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat. Ditambahkan, DPR dan pemerintah sangat terbuka, serta akomodatif terhadap berbagai masukan masyarakat sehingga rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II yang semula dilaksanakan 12 April 2013, ditunda menjadi 25 Juni 2013 dan akhirnya dijadwalkan tanggal 2 Juli 2013.

“Pemerintah dapat memahami dan menyetujui berbagai perubahan mendasar dalam RUU Ormas baik aspirasi filosofis, substansif maupun materi. Karena itu kami sependapat dengan DPR yang menyetujui RUU Ormas untuk disahkan menjadi Undang-undang,” demikian Mendagri. (si, mp)/  
foto:iwan armanias/parle.

## Pansus Berupaya Maksimal Sempurnakan Draf RUU Ormas

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan bahwa Pansus RUU ormas telah berupaya maksimal demi menyempurnakan dan menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas yang terbaik bagi kepentingan nasional bangsa dan Negara.

“Demi penyempurnaan tersebut, Pansus sudah berusaha melakukan konsultasi dengan menghadiri dan mendatangi beberapa Ormas besar untuk meminta masukan, dan Insya Allah, beberapa masukan itu sudah kita cantumkan dan ditulis sesuai dengan kepentingan dan keinginan sesuai dengan aspirasi yang berkembang,” kata Haramain dalam laporannya di

Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (2/7)

Sebelumnya, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Paripurna DPR tanggal 25 Juni 2013, memutuskan untuk menunda Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ormas dan menjadwalkan kembali pada Rapat Paripurna tanggal 2 Juli 2013 guna memberikan kesempatan kepada Pansus untuk menyempurnakan naskah RUU tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Pansus RUU Ormas, Ketum PP Muhammadiyah, Ketum PBNU, Pengurus Persekutuan Gereja-



Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain.



Gereja Indonesia (PGI), Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI dan Ketum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Setelah sempat tertunda pada Paripurna lalu, akhirnya Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyetujui RUU Ormas melalui mekanisme voting,

dengan rincian 311 anggota Dewan menyetujui, sementara 50 orang menolak RUU Ormas tersebut. (nt)/foto: iwan armanias/parle.

## Komisi VIII Desak PT Pos Sediakan Pos-pos Penyaluran BLSM

Komisi VIII DPR RI mendesak PT Pos Indonesia untuk menyediakan pos-pos penyaluran BLSM, agar masyarakat tidak perlu antri di Kantor Pos untuk mendapatkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), karena PT Pos Indonesia akan menyediakan pos-pos penyaluran di titik-titik komunitas masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria saat memimpin RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung dan Direktur PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, Senin (1/7) di gedung DPR.

PT Pos Indonesia menjadi satu-satunya BUMN yang dipercaya untuk menyalurkan BLSM. Mengingat masyarakat miskin Indonesia menyebar di berbagai pelosok nusantara, tentu akan menyulitkan masyarakat jika pengambilan BLSM tersebut hanya melalui Kantor Pos yang notabene terbatas di wilayah perkotaan.

“Jika pengambilan BLSM hanya dilakukan melalui kantor pos, bagaimana dengan masyarakat yang berada di pelosok, Papua misalnya. Bukan tidak mungkin jika mereka

mengambil ke Kantor Pos akan mengeluarkan ongkos yang jauh lebih mahal dibanding nominal dari BLSM yang akan diterimanya,” ungkap Sayed.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Komisi VIII mendesak PT Pos Indonesia untuk menyediakan Pos-pos penyaluran diberbagai titik komunitas masyarakat. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mengambil BLSM tanpa harus mengeluarkan ongkos.

Menjawab hal tersebut, Direktur PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana mengatakan bahwa pihaknya siap melaksanakan permintaan tersebut.

“Ini sudah menjadi komitmen kami, pelaksanaan BLSM 70 persennya kami lakukan di komunitas-komunitas, walaupun untuk itu kami harus menyewa pesawat atau kapal laut. Penyaluran di pelosok-pelosok akan kami lakukan dengan membangun tenda-tenda dan kursi-kursi untuk masyarakat yang akan mengambil BLSM tersebut tentu dengan menunjukkan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) serta bukti identitas lainnya,” kata Mardjana. (Ayu) foto: ry/parle

## TVRI Butuh 130 Milyar Untuk Maksimalkan Jangkauan Siaran



Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin.

Komisi I DPR RI menginginkan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) meningkatkan luasan jangkauan siaran. Untuk itu, TVRI membutuhkan anggaran sebesar Rp.130 Milyar.

Berdasarkan pemantauan dan pengawasan Komisi I yang membidangi penyiaran terhadap LPP TVRI, bahwa jangkauan siaran hanya 40% seluruh Indonesia. “TVRI harus menyampaikan pesan mempersatukan wilayah NKRI,

Kita ingin siaran TVRI dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah wilayah perbatasan,” kata Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin.

RDP Komisi I dengan Dirut LPP TVRI Farhat Syukri dan seluruh Kepala stasiun TVRI se-Indonesia, beragendakan laporan jangkauan siaran LPP TVRI dan dukungan infrastruktur serta kendala dan hambatanya yang dihadapi, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (1/7).

Komisi I akan mendukung anggaran yang dibutuhkan LPP TVRI untuk meningkatkan luasan jangkauan siaran. “Kita ingin meningkatkan dengan anggaran yang cukup paling tidak sampai menjangkau 90%,” tegas TB. Hasanudin.

Dirut LPP TVRI Farhat Syukri menjelaskan sejak tahun 1998, ketika tidak ada lagi Departemen Penerangan investasi pemancar tidak lagi dilakukan. “Kondisi jangkauan siaran TVRI yang seharusnya 80% menjangkau wilayah Indonesia, saat ini menurun sangat drastis hingga 34%,” katanya.

Hal itu disebabkan pemancar TVRI menggunakan yang beroperasi pada band VHF (*Very High Frequency*) dan ada juga yang dengan band UHF (*Ultra High Frequency*) VHF, padahal saat ini eranya UHF, dan kondisi stasiun TVRI rusak berat.

Untuk meningkatkan jangkauan siaran hingga 80% di seluruh Indonesia, Farhat Syukri menekankan harus ada migrasi dari VHF ke UHF, digambarkan jumlah pemancar yang dimiliki TVRI sebanyak 380. Namun yang bisa operasional saat ini hanya sekitar 120 pemancar, sisanya sebagian tidak operasional lagi.

Dia menginginkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menyaksikan siaran TVRI, maka harus mengadakan pemancar-pemancar UHF seluruh wilayah Indonesia. Sudah ada pemancar UHF di 89 lokasi, dari proyek ITTS I Kementerian Kominfo di 36 lokasi, sisanya diadakan sendiri oleh TVRI dan bantuan Pemda.

“Dibutuhkan sekitar 120 pemancar untuk menggantikan VHF ke UHF, dengan 120 pemancar UHF masyarakat yang selama ini kehilangan informasi

TVRI, dapat menyaksikan kembali,” kata Farhat Syukri.

Kemudian memenuhi keinginan dari kebijakan negara yakni pengalihan ke era digital di tahun 2018, *analog switch off*, pemancar UHF diharapkan bisa *ready to digital* di stasiun besar. Menurut Farhat tidak mungkin masyarakat langsung dipindahkan ke digital.

Belum semua televisi di masyarakat bisa digital, maka harus simultan. Dijelaskannya dianalog tetap jalan, digital sudah mulai. Sementara ini ada 4 daerah, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Batam.

“Untuk memaksimalkan jangkauan siaran LPP TVRI membutuhkan anggaran sekitar 130 Milyar untuk pemancar,” ungkap Farhat Syukri. (as) *foto:ry/parle*

## Komisi X Dukung Koni Tingkatkan Prestasi Olah Raga



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri (kanan) saat memimpin RDPU dengan Ketua KONI Pusat dan jajarannya.

Komisi X DPR menyatakan dukungannya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait dengan peningkatan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga. Komisi yang membidangi olahraga dan pendidikan ini akan mendukung sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPR terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh Ketua KONI.

“Ketua KONI sudah melaporkan

berbagai masalah yang mereka hadapi sebagai pembina olahraga tingkat nasional. Jadi, Ketua KONI sudah menjelaskan dari segi kebijakan, anggaran, dan perhatian pemerintah yang kurang optimal dalam mendukung kegiatan-kegiatan KONI. Oleh karena itu, Komisi X mendukung usulan ini, agar olahraga nasional kita bangkit lagi,” jelas Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bahri ketika memimpin RDPU dengan Ketua KONI Pusat Tono Suratman



di Gedung Nusantara I, Senin (1/7).

Dalam paparannya, KONI menyatakan agar kawasan Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) dikembalikan eksistensinya sebagai pusat pembinaan prestasi olahraga sebagai amanat dari pendiri bangsa. KONI menilai sarana dan prasarana olahraga di kawasan itu beralih fungsi menjadi kegiatan komersial, seperti mall, hotel, dan apartemen, sehingga tidak ada kontri-



businya dalam pengembangan prestasi olahraga.

Selain itu, terkait dengan anggaran, selama ini KONI hanya mendapatkan bantuan sosial dan diberikan pada pertengahan tahun, sehingga tidak mampu mendukung pelaksanaan tupoksi KONI secara maksimal. Untuk itu, Komisi X akan mengusulkan mengubah format alokasi anggaran.

“Komisi X akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan RI untuk mengubah format pengalokasian anggaran KONI yang semula dalam bentuk ban-

dos menjadi hibah,” tambah Syamsul.

Terkait dengan perhatian kepada mantan atlet, Syamsul menyatakan bahwa mereka jangan sampai dilupakan. Mereka telah membuat harum nama bangsa, sehingga negara harus tetap memberikan perhatiannya. “Oleh karena itu, perlu dirumuskan berbagai kebijakan agar negara memperhatikan kepada mantan atlet kita. Memang KONI tidak memiliki kekuatan yang memadai, karena mereka tidak didukung oleh kebijakan maupun aturan,” ujar politisi Golkar ini.

Untuk menanggapi berbagai usulan dan permasalahan yang ada di KONI, Komisi X merencanakan untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Kementerian BUMN, dan Sekretariat Negara. “Kita cari jadwal yang tepat yang bisa sinkron dengan Komisi lain dan pemerintah. Jadi kita cari waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan terkait dengan KONI ini,” tambah Syamsul. (sf)/foto:odjje/parle/iw.

## Kasus Plagiatisme Tesis Akan Dibawa Rapat Lintas Komisi



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat memimpin kunjungan spesifik ke Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto (F-PDI Perjuangan), mengatakan pendidikan harus menjadi motor utama dalam hal-hal yang baik, sementara ada kegiatan plagiatisme yang sangat serius di bidang akademik.

“Kita tahu bahwa ini banyak terjadi dimana-mana, itu sebabnya kita perlu melakukan tindakan,” ujar Utut saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong, Jum’at (28/6).

Tetapi, lanjutnya, sebelum kita melakukan langkah-langkah yang terukur, kita perlu turun kesini dulu (UKIP). Makanya tim kunjungan spesifik Komisi X DPR datang ke UKIP Sorong ini terkait dengan adanya dugaan plagiatisme tesis yang sebelumnya telah dilaporkan oleh pihak UKIP Sorong ke Komisi X DPR dan juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian di Polda Bali.

Menyangkut masalah penjiplakan tesis milik UKIP Sorong yang diduga dilakukan oleh pihak Sekolah Tinggi

Teologia (STT) Kingdom Bali yang juga sudah dilaporkan ke Komisi X DPR, Utut menjelaskan bahwa masalah ini ‘kan tidak hanya menyangkut Komisi X DPR saja.

Menurut Utut, Komisi X perlu rapat gabungan dulu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama (Menag). Apalagi UKIP Sorong ini termasuk pionirnya, dan harus didorong supaya pendidikan kedepannya bersih. Kalau masalah ini selesai, mudah-mudahan jual-beli ijazah, plagiatisme otomatis terkikis. “Ini ‘kan melibatkan banyak lembaga, melibatkan banyak kepentingan, masyarakat ‘kan kebanyakan mau mudahnya saja,” tegasnya.

Ditegaskan lagi, pihaknya akan mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi VIII DPR yang mitra kerjanya Kementerian Agama, dan penguatan utama nantinya di Dirjen Dikti Kemendikbud terutama pengaturan program studi dan pengawasannya harus ketat. “Kasus di UKIP Sorong terjadi karena pengawasan dari Dirjen Dikti maupun dari Kementerian Agama masih belum optimal. Kita tidak menghendaki ini berkembang kemana-mana,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UKIP Sorong Sasmoko mengatakan ada 20 tesis UKIP Sorong yang diplagiat atau diba-



jak oleh STT Kingdom Bali, yang tentu saja sangat merugikan UKIP Sorong. Pihaknya yang bimbing, mendidik jadi bagus tahu-tahu dibajak oleh STT Kingdom Bali, seolah-olah ini (tesis) karya mereka. “Sampulnya diganti, kata pengantarnya diganti, pembimbingnya juga diganti, judul dan metodologi, analisa, titik komanya *pleg* alias persis sama,” ujar Sasmoko.

Wakil Rektor I Bidang Akademik UKIP Sorong, Yohanis Don Bosco mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 pihaknya mendapatkan SK dari Kementerian Agama untuk melakukan percepatan peningkatan kualifikasi guru dan dosen di wilayah sekolah tinggi teologi dan juga pendidikan agama Kristen di seluruh Indonesia.

Dengan dasar SK tersebut mulailah

pihaknya melakukan pendekatan dengan beberapa tempat salah satunya dengan STT Kingdom Bali. Apa yang diperintahkan undang-undang semua dilakukan, misalnya dosennya kesana membimbing mahasiswa S2. Dalam perjalannya sampai pada proses akhir tesis sudah dilakukan, ada proses bimbingannya, dosen-dosennya berangkat ke Bali untuk lakukan proses-proses bimbingan pembuatan tesis, sampai ujian selesai.

Namun belakangan, lanjut Bosco, ada perintah dari Bimas Kristen bahwa harus ada ujian negara. Sambal menunggu ujian negara tersebut ternyata ada komunikasi antara Bimas Kristen dan pihak STT Kingdom Bali sehingga mereka melaksanakan ujian sendiri.

“Mereka ubahlah tesis kami. Menurut Ketua STT Kingdom Bali bahwa itu perintah Dirjen, ada suratnya, ada emailnya dan email itu kami dapatkan dari mahasiswa S2 yang merasa dirugikan,” ujar Bosco sambil menunjukkan contoh tesis mahasiswa yang dijiplak dimana judul dan isinya sama persis, yang beda hanya kata pengantar dan dosen pembimbing.

Kunjungan spesifik Komisi X DPR RI terdiri atas 7 orang dipimpin Wakil Utut Adianto didampingi Diaz Gwi-zangge dari F-PD; Itet Tridjajati Sumarijanto dari F-PDI Perjuangan; Ahmad Zainuddin dari F- PKS; Sunartoyo dari F-PAN; Machmud Yunus dari F-PPP; dan Mughtar Amma dari F-Partai Hanura. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## Wartawan Diharapkan Bekerja Secara Profesional dan Proporsional

Sekjen DPR Winantuningtyastiti berespeda kepada para wartawan untuk bekerja secara profesional dan proporsional. Hendaknya pers bisa mengangkat berita yang positif, jika memang itu positif.

Demikian dikemukakan Sekjen DPR pada acara *Press Gathering* dengan wartawan dan keluarganya di Wisma Kopo Bogor, Sabtu (29/6) malam.

Menurut Sekjen DPR yang akrab disapa Win, sekarang ini profesionalisme wartawan itu harus dibuktikan dengan kapasitasnya dalam menulis berita. “Jika ada anggota DPR yang bekerja keras itu, ya harus diacungi jempol. Bila ada kekurangan, ya dievaluasi, tapi dengan cara kritik yang konstruktif, untuk membangun lembaga DPR,” tutur dia.

Dikemukakannya, masyarakat sekarang mudah untuk mengakses berita dari media, sehingga peran wartawan ini sangat penting. Selain profesional dalam mengangkat berita, wartawan juga berperan dalam sarana untuk pendidikan politik masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang memerlukan berita yang baik, sekaligus

juga memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi institusi.

Ia tidak menampik adanya anggota Dewan yang berperilaku tidak baik. Jika ada yang tidak baik itu hanya dilakukan oleh oknum. “Dari 560 anggota itu berapa orang sih yang tidak baik? Ini yang harus diluruskan,” tegasnya dengan menambahkan, pendidikan politik harus diperankan berbagai pihak, termasuk wartawan. “Itu sangat penting”.

Mengenai acara silaturahmi dengan wartawan ini, Sekjen DPR menjelaskan, tujuannya memperkuat DPR dan alat kelengkapan dalam meningkatkan kinerja DPR. Dia yakin apa yang menjadi tujuan inti dari teman-teman pers dari lembaganya masing-masing sebagai fungsi kontrol kepada DPR, juga sebagai jembatan bagi masyarakat dan DPR. Melalui teman-teman wartawan inilah, masyarakat terinfokan tentang DPR dengan mudah.

Namun Win juga menyampaikan pesan anggota dewan kepada teman-teman pers untuk tidak perlu mengadakan, tetapi mengekspos yang sebenar-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

benarnya. Ada anggota dewan yang bekerja sampai pagi, tengah malam, bahkan berturut-turut beberapa hari. “Hal ini bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi sungguh, inilah kerja keras yang dilakukan anggota DPR,” tandasnya lagi.

Dari perspektif manapun, lanjut

Win, tugas wartawan dan Setjen DPR sama, dalam rangka membangun DPR semakin lebih baik, supaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk tujuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pengawasan dari wartawan mewakili masyarakat ini sangat penting untuk melihat secara professional. “Jadi saya membuka

pintu apabila ada yang ingin mengklarifikasinya,” ungkapnya.

Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR Jaka Suryo mengatakan, *Press Gathering* wartawan dan keluarganya dengan Setjen DPR kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Pertama digelar di Ciater, Subang, yang kedua di Anyer

dan ketiga kalinya di Wisma DPR Kopo, Bogor. Ia menyampaikan terima kasih atas kerja samanya dengan Setjen sehingga sarana memperingati silaturahmi antara Setjen DPR dengan keluarga wartawan dapat dijalin lebih erat lagi. (mp,sf) foto:ry/parle

## Data Penerima BLSM dari BPS Kacau



Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Komisi VIII DPR RI menganggap data yang diberikan BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai landasan penerima BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) 2013 kacau.

Sebanyak 15,5 juta rumah tangga yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin direncanakan akan menerima BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Sayangnya data tersebut diambil dari data BPS tahun 2011.

Hal tersebut mengundang pertanyaan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI saat berlangsungnya RDP dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial dan Direktur PT Pos Indonesia pada Senin (1/7).

“Saya menilai proses pendataan ini kacau, kenapa data tahun 2011 bisa digunakan untuk tahun 2013. Dalam kurun waktu dua tahun pasti terjadi mobilitas di masyarakat. Ada yang meninggal, ada yang lahir, bahkan ada yang berubah tingkat perekonomiannya. Kekacauan data seperti ini bisa menimbulkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan da-

lam penyaluran BLSM,” ujar anggota Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily.

Bahkan ditambahkannya hal tersebutlah yang membuat KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang menjadi bukti diri penerima BLSM tersebut sampai dengan 28 Juni 2013 lalu retur sebanyak 8.554 KPS.

Penilaian senada juga disampaikan anggota Komisi VIII lainnya, salah satunya dari Adang Ruchiatna Puradireja yang sangat menyayangkan data BPS yang dijadikan landasan oleh Kemensos dan PT Pos untuk menyalurkan BLSM merupakan data tahun 2011.

Menjawab ungkapan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan bahwa amanat UU No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, yang intinya orang miskin akan di data oleh BPS minimal dua tahun sekali, dan Kemensos diberikan verifikasi setiap enam bulan sekali.

Ditambahkan Dulung, *Basic* data yang dipakai sebagai landasan penyaluran BLSM merupakan data dari BPS untuk pemberian raskin di tahun 2012, sementara data jamkesmas atau jamkesda tidak bisa digunakan karena data tersebut data per orang, sedangkan data raskin merupakan keluarga atau rumah tangga.

“Data tersebut lebih baik dari data tahun 2005 dan 2008. Kami memang mengharapkan data 2011 tersebut dapat diverifikasi dan validasi dari desa-desa setempat, untuk itu kami mengharapkan peran serta aparat desa. Kami mengakui hal tersebut belum sepenuhnya dijalankan,” jelas Dulung.

Menanggapi jawaban Dirjen Linjamsos, Kemensos, Komisi VIII meminta agar Dirjen Linjamsos, Kemensos untuk terus melakukan pemutakhiran data bagi penerima BLSM dengan melakukan koordinasi dengan BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta dengan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan kepala desa/lurah setempat. Selain itu, Komisi VIII juga mendesak Dirjen Linjamsos, Kemensos untuk memberikan data penerima BLSM paling lambat 8 Juli 2013 kepada Komisi VIII. (Ayu) foto:ry/parle



# Penyelesaian Dugaan Makelar Jabatan di Polri Harus Transparan



Anggota Komisi III DPR Taslim.

Anggota Komisi III DPR RI Taslim meminta dugaan suap dalam memperoleh jabatan di Polri agar diselesaikan dengan transparan. Langkah ini perlu

untuk menjawab keraguan publik terhadap kelangsungan reformasi birokrasi yang berlangsung di Korps Bhayangkara tersebut.

“Polri kita hari ini sudah 67 tahun, institusi pelayanan publik ini sudah cukup tua. Jadi kita minta dugaan penyuaian, sogok menyogok dalam memperoleh jabatan di Polri harus diselesaikan dengan transparan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/7/13).

Politisi FPAN ini mengaku beberapa kali mendapat pengaduan dari publik soal dugaan suap dalam memperoleh jabatan di Polri. Namun laporan itu menurutnya tidak dilengkapi bukti yang cukup. Ketika seorang perwira Polda Jateng AKBP ES tertangkap

membawa uang tunai Rp.200 juta di Mabes Polri, seharusnya bisa menjadi pintu untuk melakukan pembenahan.

“Saya pernah mendapat pengaduan tapi tidak dengan bukti. Jadi ini seperti bukan rahasia, sudah jadi pembicaraan tapi sulit membuktikan. Sekarang kita minta Kapolri agar melakukan pembenahan ke dalam, pembenahan moral,” imbuhnya.

Selaku wakil rakyat ia menekankan akan menjalankan fungsi pengawasannya, mencermati bagaimana Kapolri dan aparatnya memeriksa dugaan aksi makelar jabatan di institusi yang dipimpinnya. “Jangan sampai Kapolri malah terkesan menutup-nutupi,” pungkask dia. (iky) foto:ry/parle

## Komisi XI DPR *Fit and Proper Test* 3 Calon DGBI

Komisi XI DPR Senin (1/7) melakukan *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) kepada tiga calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Muliawan D. Hadad yang mengundurkan diri. Ketiga calon Deputy Gubernur BI itu adalah Asisten Gubernur BI Hendar, Asisten Gubernur BI Mulya Siregar dan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa Treesna Wilda Suparyono.

Calon Deputy Gubernur pertama yang melakukan presentasi adalah Hendar. Hendar diberikan waktu 30 menit untuk memaparkan visi dan misinya di BI. Dalam paparannya ia menjelaskan empat tantangan yang dihadapi BI ke depan. Empat tantangan itu adalah pertama, terkait dengan kesehatan institusi keuangan yang tidak terjamin akibat gejolak pasar global yang tidak menentu. Tantangan berikutnya, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap perbankan. Hal ini mengakibatkan, banyak penduduk yang lebih memilih menggunakan mata uang negara asing.

Tantangan ketiga, menyangkut peningkatan efisiensi sistem keuangan. Walaupun suku bunga sudah menurun tajam di angka 10 persen, namun ia menilai angka ini masih cukup tinggi. Tantangan terakhir, bagaimana kesiapan organisasi terkait SDM, terutama pasca pengalihan fungsi BI kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) nanti.

Calon Deputy Gubernur lain yang diuji adalah Treesna Wilda Suparyono. Ia memaparkan tujuh terobosan yang akan ia jalankan jika ia terpilih menjadi Deputy Gubernur BI. Terobosan itu diantaranya, peningkatan kerjasama antar bank sentral, peningkatan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan *track record* bagi UMKM melalui pengembangan *financial inclusion*.

Terobosan berikutnya, ia akan menciptakan wirausaha-wati atau *Women Entrepreneur*. Dengan program ini, ia ingin memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berperan serta dalam membangun negeri. Kemudian, peningkatan harmonisasi hubungan bank Indonesia dengan sesama penentu kebijakan dan *stake holder* lainnya, kemudian Treesna juga akan melakukan perluasan implementasi skim inti plasma dalam pembiayaan UMKM, dan terakhir, penguatan kantor perwakilan bank Indonesia dalam negeri.



Salah satu kandidat calon Deputy Gubernur Bank Indonesia Mulya Siregar.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Rahmat.

Sedangkan calon Deputi yang terakhir, Mulya Siregar menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ia menyatakan, UMKM tidak bisa disamakan dengan perusahaan besar, sehingga aturan-aturan BI yang selama ini tidak pro UMKM akan direvisi.

Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat usai melakukan *fit and proper test* kepada tiga calon menyatakan bahwa ketiga calon ini sama kuat dan bagus. Ia menilai masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.

“Mereka bagus-bagus, namun saya belum bisa memberikan referensi, karena mereka punya kelebihan dan kekurangan. Secara umum, paparan mereka hampir sama. Mereka sudah mengabdikan di BI sudah lama, sehingga kerangka berpikirnya hampir sama,” ujar Andi.

Ia menyatakan sampai saat ini ia belum bisa menentukan pilihannya. Ia perlu bicara dengan anggota fraksinya di Komisi XI. “Kesepakatan dari anggota sangat penting, sehingga kita satu suara. Karena setiap anggota pasti punya referensi masing-masing,” tambah Andi.

#### Pengambilan Keputusan Ditunda

Sedianya usai melakukan *fit and proper test* kepada tiga

calon deputi, pada malam harinya diambil keputusan. Namun rapat internal memutuskan, hasil keputusan komisi akan diumumkan pada 8 Juli nanti.

“Hasil rapat internal memutuskan mengumumkan hasilnya pada 8 Juli nanti. Ada beberapa fraksi yang meminta itu agar diberikan waktu satu minggu untuk memutuskan,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

Harry menambahkan, pengambilan keputusan Dewan Gubernur BI ini akan berbarengan dengan penetapan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Direncanakan, hari ini (2/7) Komisi XI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BSBI.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat menyatakan bahwa ini masalah jadwal saja. Ia menyatakan, dalam seminggu ke depan ini bisa menjadi waktu buat anggota Komisi XI menentukan pilihannya.

“Namun hal itu tidak terlalu menguat di diskusi intern. Kali ini mungkin teman-teman anggota Komisi menganggap perlu disatukan dengan BSBI juga, jadi penjadwalan di Paripurna sekaligus. Melapornya sekalian saja,” ujar Andi usai uji kelayakan dan kepatutan. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

## Komisi IV Setujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Komisi IV DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, untuk disahkan dalam Sidang Paripurna mendatang.

Demikian hasil Rapat Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, dengan Menteri Pertanian Suswono, di Gedung Nusantara DPR, Kamis (4/7). RUU ini mendelegasikan pembentukan 2 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Menteri.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Hanura Murady Darmansjah menjelaskan bahwa RUU ini sebagai upaya untuk revitalisasi sektor pertanian. “Pengaturan mengenai lahan, komoditas, pasar, sarana produksi, sistem informasi, pembiayaan, dan kelembagaan merupakan pengaturan terhadap pertanian secara menyeluruh,” jelasnya.

Murady memandang perlu adanya pengawasan sebagai jaminan tercapainya tujuan dan pemberdayaan petani, meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. “Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya,” katanya.

Dikatakannya, beberapa bentuk kebijakan dapat dijadikan pelindung kepentingan petani nasional, antara lain subsidi sarana produksi, penerapan tarif bea masuk, dan penetapan pintu masuk barang impor.

“Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional,” papar Murady.

Selain itu juga dilakukan penetapan pintu masuk barang



impor yang bertujuan melindungi hasil pertanian petani lokal. “Penetapan pintu masuk barang impor komoditas pertanian dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan dilengkapi balai karantina,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo mengatakan bahwa RUU ini diharapkan mampu menjawab persoalan petani khususnya dalam memperoleh akses pembiayaan.



Anggota Komisi IV DPR Murady Darmansjah menyerahkan Pandangan Fraksi kepada Ketua Rapat Firman Soebagyo.

“RUU ini meminta pemerintah segera membentuk lembaga khusus pertanian yang memberikan pembiayaan bagi para petani dan kita harapkan peran BRI disitu,” ujarnya.

Menurutnya, saat terjadi gagal panen tentunya para petani dapat memperoleh ganti rugi yang layak sesuai amanat UU ini nantinya. “Nanti ada aspek ganti rugi karena adanya asuransi pertanian,” tambahnya.

41 triliun. Seperti diketahui, petani gurem dan buruh tani kerap kesulitan memperoleh akses perbankan.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa RUU ini diharapkan akan membawa perubahan nyata bagi petani penggarap dan buruh tani dengan luas lahan Usaha Tani kurang dari 0,5 hektar. (as)/foto:wahyu/parle/iw.

Dia menambahkan, RUU mengamanatkan adanya redistribusi lahan terlantar bagi para petani dengan luas 2 hektar untuk rumah tangga. “Nantinya mereka dapat mengelola lahan tersebut selama 5 tahun berturut-turut namun tidak boleh dibagikan kepada ahli waris,” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia dari penyaluran kredit perbankan nasional tidak sampai 8 persen diserap sektor pertanian (arti luas) dari total pagu kredit ke sektor UMKM sekitar Rp

## RUU P3H Diusulkan Pengambilan Keputusan Pada Sidang Paripurna DPR RI

Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P3H) telah mendapatkan persetujuan seluruh Fraksi di Komisi IV DPR RI untuk diusulkan pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna Dewan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Persetujuan itu diambil saat Rapat Kerja Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Herman Haeron, dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Gedung DPR, (1/7)

Namun, persetujuan tersebut mendapatkan catatan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Anggota FPDIP Ian Siagian mengatakan Fraksinya menolak Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanan terlalu tinggi.

“Fraksi PDIP menolak bila kayu hasil sitaan tersebut dilelang, karena tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku *illegal logging*,” tegas Ian Siagian

Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan *moral hazard* bagi masyarakat, bahkan ditengarai dapat dimanfaatkan oleh para cukong dengan memanfaatkan masyarakat melakukan pembalakan liar dan ajang pencucian uang oknum atau pihak penadah hasil *illegal logging*.

Fraksi PDIP mengusulkan agar Pasal 44 ayat (3) diganti menjadi, barang bukti hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi disita Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Ketentuan lebih lanjut tentang ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Usul ini sebagai tindakan preventif



Anggota Komisi IV DPR Ian Siagian.

sekaligus untuk memberikan efek jera bagi oknum yang berusaha untuk memanfaatkan celah hukum dan mengambil keuntungan dari hal tersebut,” papar Ian Siagian. (as)/foto:odjje/parle/iw.

# DPR RI Menyetujui Anggota KIP 2013-2017



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berfoto bersama 7 orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017.

DPR RI menyetujui 7 orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017, melalui musyawarah mufakat yang dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR, setelah melakukan uji kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP Komisi I DPR.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa

(2/7). Wakil Ketua Komisi I dari F-PD Ramadhan Pohan menyampaikan tujuh nama yang terpilih adalah Abdulhamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S. Widyaningsih (*incumbent*), John Fresly, Rumadi, dan Yhannu Setyawan.

DPR mengharapkan kepada Anggota KIP menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, serta me-

nyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

“Kita mengharapkan agar 7 orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 terpilih ini dapat melaksanakan fungsi Komisi Informasi yang baik, yaitu sebagai lembaga mandiri untuk menjalankan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya,” tegas Ramadhan Pohan.

Selain itu, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya anggota KIP yang berhalangan tetap, maka DPR juga menyetujui empat nama cadangan yaitu Wahyu Kuncoro, Halomoan Harahap, Juniardi, dan Tiurma Mercy Sion Sihombing.

Selanjutnya, DPR akan menyampaikan persetujuan ini kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan Presiden menjadi Anggota KIP periode 2013-2017. (as)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Sahkan Agus Joko Sebagai Anggota BPK



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengesahkan Agus Joko Pramono sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPK RI.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Selasa (2/7) mengesahkan Agus Joko Pramono sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Taufiqurrahman Ruki. Dari hasil voting di Komisi XI, Agus Joko memperoleh suara terbanyak, yaitu 42 suara.

“Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pada 25 Juni 2013, disepakati pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara, Komisi XI menyepakati dan memutuskan untuk memilih Saudara Agus Joko Pramono



Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang.

sebagai PAW Anggota BPK Saudara Ruki yang telah pensiun pada usia 67 tahun,” papar Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (2/7).

Dalam paparannya, Andi menjelaskan bahwa hasil lengkap pemungutan suara, adalah; Eddy Rasyidin memperoleh 1 suara. Muchayat 12 suara, Agus



Joko Pramono memperoleh 42 suara, dan Gunawan Sidauruk 1 memperoleh 1 suara.

Sebelumnya, Komisi XI mendapatkan penugasan untuk membahas penggantian antar waktu Anggota BPK. Kemudian, Komisi yang dipimpin oleh Emir Moeis ini mengumumkan rencana pemilihan Anggota BPK Antar Waktu di media massa dari tanggal

15 – 22 April 2013. Dari pengumuman tersebut, masyarakat yang mendaftar sebanyak 22 orang, yang kemudian dilakukan seleksi administratif.

Kemudian, 22 nama ini juga diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk juga melakukan *fit and proper test*. Hasil uji kelayakan dan keputusan dari DPD kemudian diserahkan kepada Komisi XI. Kemudian

pada 18 - 19 Juni 2013 melakukan *fit and proper test* kepada 22 calon, namun ada 1 calon yang mengundurkan diri, sehingga yang diuji hanya 21 orang.

“Persetujuan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku,” tutup Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menambahkan. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Segera Sahkan RUU Desa



Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desa, Budiman Sudjatmiko mengatakan DPR merencanakan akan mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU) tentang Desa pada Jumat, 12 Juli 2013 mendatang. Menurutnya, sudah tidak ada lagi kendala yang signifikan sehingga RUU Desa sudah bisa dibawa ke paripurna.

“Hanya tinggal tiga masalah pokok saja yang perlu pembahasan intens yakni masalah keuangan desa dan masa jabatan kepala desa serta rumusan desa dan desa adat. Saya yakin dalam satu kali pertemuan lagi dengan pemerintah dua poin tersebut selesai dan RUU disahkan jadi UU. Makanya Pansus yakin 12 Juli 2013 sudah bisa disahkan,” kata Budiman Sudjatmiko, dalam acara Forum Legislasi bertema ‘RUU Pemerintahan Desa’, di Press Room DPR gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (2/7).

Menyangkut keuangan desa lanjut Sudjatmiko, didalam masalah sumber pendapatan desa dan desa adat yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat. Dalam rumusan yang sedang dibahas oleh Panja akan ditetapkan prosentase tertentu dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dan kota dalam APBD. Pemerintah mengusulkan 10 persen.

“Namun fraksi-fraksi di DPR menginginkan alokasi dana untuk desa yang secara langsung dari APBN di luar dana perimbangan, sebesar 6 persen dari total nilai APBN, dialokasikan melalui kementerian yang menangani desa,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sedangkan untuk masa jabatan kepala desa, menurut Sudjatmiko, masih ada dua alternatif yakni masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dan masa jabatan delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Terakhir masalah desa dan desa adat. Dalam RUU ini diakui dua jenis desa yaitu Desa (anonim) dan Desa Adat. “Pengakuan pada kedua jenis ini berimplikasi pada penataan dan penyelenggaraan desa. Ada substansi yang berlaku umum untuk kedua desa tersebut, tetap ada yang hanya berlaku pada salah satu jenis desa saja,” ungkap dia. (as) Foto: Iwan Armanias/Parle.

## Panja Sawit dan Karet Gali Informasi Dari Pemerintah

Panitia Kerja Sawit dan Karet Komisi VI DPR RI sedang menggali informasi dari pemerintah seputar tata kelola lahan dan tata kelola perizinan di perkebunan sawit dan karet. Konflik lahan perkebunan sawit selalu terjadi di hampir semua provinsi.

Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) yang memimpin rapat mengatakan, rapat Panja Komisi

VI ini berorientasi untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya mengenai persoalan sawit dan karet di Tanah Air. Rapat menghadirkan Deputy Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan.

“Rapat kita hari ini secara khusus



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana.

ingin mencari masukan mengenai permasalahan lahan di persawitan, terutama berkaitan dengan tata kelola perizinan termasuk kepastian hukum mengenai kewajiban menyediakan 20% lahan untuk plasma dan juga mengenai tata ruang, termasuk kami ingin mendapatkan informasi perkembangan terakhir dari review rencana tata ruang wilayah provinsi yang saya kira ini menjadi sumber konflik hampir di

semua provinsi,” kata Erik di gedung DPR (Rabu 3/7).

Pemerintah sendiri sudah memasang target rencana pada tahun 2025 produksi CPO mencapai 40 juta ton per tahun. Namun saat yang sama pemerintah juga sedang memberlakukan moratorium perizinan lahan sawit. Jadi, Panja ini sangat berkepentingan mendapat informasi yang konprehen-

sif soal ini.

“Karena target ini yang menetapkan pemerintah, kemudian pemerintah juga yang membuat kebijakan moratorium, saya kira ini perlu penjelasan yang lebih *clear* bagaimana upaya target mencapai 40 juta ton produksi CPO kalau kebijakan moratorium ini tetap dipertahankan,” tandas Erik. (mh) Foto: iw/parle.

## Komisi XI *Fit and Proper Test* Calon Anggota BSBI

Menanggapi surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Komisi XI DPR RI menggelar *fit and proper test* terhadap sepuluh kandidat usulan Presiden itu. Calon Anggota BSBI ini untuk menjabat periode 2013 -2016.

Sepuluh calon anggota BSBI itu adalah Chairul Djakman, Fadil Hassan, Arianto Patunru, Tony Prasetyantono, Mudrajad Kuncoro. Kemudian ada Sri Adiningsih, Ahmad Erani Yustika, Deswandhy Agusman, Umar Juoro, dan Sidharta Utama. Namun, tidak semua calon menghadiri uji kelayakan dan kepatutan ini.

“Kami sudah menghubungi sepuluh nama ini. Sekretariat Komisi XI melaporkan ada dua calon tidak memberikan respon. Jadi hari ini kita akan menguji delapan calon. Kita harapkan bisa selesai hari ini,” jelas Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis ketika memimpin RDPU di Gedung Nusantara I, Rabu (3/7).

Calon anggota yang tidak merespon itu, tambah Harry, adalah Arianto Patunru dan Sidharta Utama. Sehingga nantinya Komisi XI hanya akan memilih calon anggota yang mengikuti *fit and proper test* ini. Direncanakan, Komisi XI akan mengambil keputusan pada 8 Juli nanti.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

“Nanti ada 54 anggota Komisi XI, dan akan mengambil keputusan, apakah bisa aklamasi lima nama, atau apakah masing-masing fraksi akan memilih satu nama, nanti akan kita lihat pada tanggal 8 Juli,” imbuh Harry.

Calon anggota pertama yang diuji adalah Umar Juoro. Dalam paparannya, Umar mengusulkan perubahan mekanisme kerja BSBI untuk mengatasi kelemahan wewenangnya. Selain itu, dalam Pasal 58 A dalam UU No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan kewenangan BI menjadi sangat terbatas.

Dengan keterbatasan ini, Umar menilai hal ini butuh sejumlah perbaikan untuk meningkatkan kinerja BSBI. Perbaikan tidak harus dengan merevisi UU

No 3 Tahun 2004, namun bisa dilakukan dengan mengubah mekanisme kerja pada periode jabatan 2010 – 2013.

Calon berikutnya yang diuji adalah Chairul Djakman dan Fadil Hassan. Kemudian dilanjutkan oleh Tony Prasetyantono dan calon berikutnya Mudrajad Kuncoro. Sampai berita ini diturunkan, uji kelayakan dan kepatutan masih berlangsung, menyisakan 3 nama, yaitu Ahmad Erani Yustika, Sri Adiningsih, dan Deswandhy Agusman. (sf) Foto: Odjie/Parle.

## Timwas DPR Harapkan BPK Dorong Lebih Cepat Penyelesaian Kasus Century

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan BPK bisa ikut mendorong lebih cepat penyelesaian kasus Century. BPK juga diharapkan bisa mengundang penyidik KPK untuk menjelaskan konstruksi hukumnya, sehingga bisa segera menghitung kerugian negara.

Hal itu dikatakan Sohibul dalam rapat konsultasi Timwas Century DPR dengan BPK di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Rabu (3/7). Sebelumnya dikatakan, BPK telah secara jelas mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara. Terkait dengan hal tersebut Timwas ingin meminta penjelasan mengenai penanganan kasus Bank Century sampai





Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

saat ini apakah sesuai dengan audit yang dilakukan BPK.

Ketua BPK RI Hadi Purnomo mengatakan, kehadirannya memenuhi undangan Timwas mengenai *progress report* penanganan kasus Bank Century. Hadi mengatakan, pihaknya mengulangi kembali bahwa terhadap kasus Bank Century telah dua kali dilakukan pemeriksaan. Laporan pertama diserahkan ke DPR tanggal 23 Nopember 2009, laporan tahap kedua tanggal 23 Desember 2011. BPK juga menyampaikan LHP tahap kedua tersebut kepada aparat penegak hukum, yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan.

Penyampaian LHP merupakan wujud tanggungjawab BPK untuk mendorong penuntasan kasus tersebut

oleh penegak hukum. Sampai saat ini BPK berkomitmen untuk membantu penyelesaian kasus tersebut, dan perkembangan yang meningkat dari lidik kemudian ke penyidikan terhadap BM dan sekarangpun telah dimintakan penghitungan kerugian keuangan negara. “Hanya proses perhitungan keuangan negara ini ada tahapannya,” jelasnya.

Penjelasan singkat ini, tidak memuaskan para anggota Timwas, mereka masih mempertanyakan soal



Ketua BPK RI Hadi Purnomo.

kerugian negara. Kemudian ditanggapi Ketua BPK bahwa instansinya hanya menghitung dugaan kerugian keuangan negara, belum sampai pada penghitungannya, belum sampai pada

ketentuan hukumnya. Ada dua unsur untuk menghitung kerugian negara yaitu berkurangnya keuangan negara dan adanya perbuatan melawan hukum.

Anggota Timwas Bambang Soesatyo juga mempertanyakan ada yang aneh mengapa KPK hanya meminta keterangan kepada BM sementara kita tahu kepemimpinan BI adalah kolektif kolegial. Bagaimana hanya *focus* kepada BM, tidak pada yang lain-lain.

Sedangkan anggota Timwas Nurhayati Aseggaf mempertanyakan, apakah dalam kasus Century ada yang mengalir ke parpol atau ke tempat-tempat lain. Ini supaya jelas, sebab pihaknya ingin kasus Century segera tuntas sehingga tidak menyandera siapa-siapa.

Penjelasan lebih jauh yang diminta Timwas Century kepada BPK tidak bisa dipenuhi, sebab BPK sesuai UUD 45 hanya berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. “Karena itu kalau di luar konstitusi kami keberatan. Masalah penyidikan tentunya bukan kewenangan BPK,” kata Hadi Purnomo menambahkan. (mp) Foto: iw/Parle.

## Ketua DPR Berikan Ceramah Pada Kongres XXI PGRI

Ketua DPR RI memberikan ceramah dengan topik “Peran DPR RI Dalam Penyusunan Regulasi dan Pengawasan Pendidikan di Indonesia dalam Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)”, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (2/07).

Peserta kongres adalah pengurus besar (PGRI), Badan Penasehat PB PGRI, Alat Kelengkapan Organisasi (DKGI dan LKBH) Tingkat Pusat, Anak Lembaga dan Badan Khusus PGRI Tingkat Nasional, Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, IGTKI PGRI Tingkat Nasional, Pengurus PGRI provinsi Seluruh Indonesia, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, dan

Kecamatan seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 10.000 orang.

“Dalam fungsi legislasi, DPR memiliki tugas menyusun payung hukum setingkat undang-undang yang menjamin kepentingan bangsa dan negara, serta menaungi kepentingan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Produk hukum yang dihasilkan, tentu saja telah difikirkan secara matang dan disusun secara komprehensif serta pro rakyat”, ujarnya.

Ketua DPR selanjutnya menjelaskan bahwa di bidang pendidikan, DPR melalui Komisi X telah menyusun serta mengundang dua UU yaitu UU ten-



Ketua DPR RI Marzuki Ali memberikan ceramah dalam Kongres ke XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

tang Kepramukaan dan UU tentang Pendidikan Dalam satu tahun sidang terakhir, beberapa RUU yang sedang dalam pembahasan DPR RI adalah RUU tentang Pendidikan Kedokteran serta RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional

Selain itu, usulan perubahan UU juga telah diajukan agar masuk dalam RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2013,

yaitu untuk RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sedangkan, dalam melakukan fungsi pengawasan Komisi X DPR-RI melakukan berbagai kegiatan berupa pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi dan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian hasil yang diharapkan.

Serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan DPR dan masih berjalan saat ini yaitu Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Panja Evaluasi RSBI, Panja Kurikulum, Panja Evaluasi Ujian Nasional, dan Panja Postur Anggaran Pendidikan yang membahas berbagai persoalan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan saat ini. (wy)foto:wahyu/parle.

## Terkait Asap DPR Kunjungi Riau



Anggota Komisi VII DPR Sutan Sukarnotomo saat memimpin kunjungan spesifik ke Provinsi Riau.

Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Riau terkait asap akibat kebakaran hutan di bumi lancang kuning tersebut.

Tim Komisi VII yang dipimpin oleh anggota DPR RI dari perwakilan Riau, Sutan Sukarnotomo (F-PD), melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah setempat dan sejumlah perusahaan diantaranya, PT. Bumi Raksa Sejati, PT. Tunggal Mitra Plantation, PT. Udaya Loh Dinawi, PT. Adei Plantation, PT. Jatim Jaya Perkasa, PT. Multi Gambut Industri, PT. Mustika Agro Lestari didampingi Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Pertanian, Lingkungan Hidup, Karpolda dan jajarannya.

Tim juga melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir dan kota Dumai.

Dalam kunjungan spesifik ke Riau, Sutan Sukarnotomo didampingi oleh rekan se-fraksinya Hj. Siti Romlah, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Bobby Adhityo Rizaldi (FPG), Irvansyah (F-PDI Perjuangan), Rofi Munawar (FPKS), Alimin Abdullah (FPAN), Tommy Adrian Firman (F-PPP), Agus Sulistyono (FPKB), Mulyadi (F-Gerindra) dan Ali Kastela (F-Hanura). (sc)

## Baleg Lakukan Harmonisasi RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat Panja RUU tentang Perubahan atas UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kamis (4/7). Rapat digelar untuk melakukan harmonisasi dan pengajuan pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU ini.

Semua fraksi menyatakan setuju agar RUU ini diteruskan rapat paripurna DPR sebagai RUU usulan DPR, terutama dari Komisi IV. Seperti diketahui, UU No.18/2009 telah dianulir MK pada tahun 2010 lalu. Banyak frase dalam UU tersebut yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

UU tersebut digugat oleh Perkumpulan *Institute For Global Justice* (IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam.



Petani Indonesia (SPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan beberapa peternak.

Dalam pandangan mini fraksi, hampir semua fraksi menganggap penting RUU ini untuk mengatur perdagangan dan kesehatan hewan. F-PKB misalnya, melihat RUU ini bisa meningkatkan profesionalisme para peternak. Selain itu, dapat mengatur kecukupan pangan yang berasal dari hewan.

Senada dengan F-PKB, F-PPP juga menilai, RUU ini penting untuk mengatur keselamatan konsumen dari bahaya penyakit yang bersumber dari hewan, seperti wabah flu burung. Selama ini, penyelenggaraan peternakan dan

kesehatan hewan belum memberikan hasil yang optimal, sehingga perlu penerapan dan pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan.

Hal lain yang disampaikan F-PPP adalah soal penguatan otoritas veteriner, pemberian sertifikasi halal bagi produk yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesejahteraan hewan harus sesuai dengan perkembangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Rapat Baleg tersebut dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono (F-PD), didampingi dua Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah, dan Sunardi Ayub (F-Hanura). (mh, rl) Foto: RY/Parle.

## Kurangnya Sosialisasi Pemerintah Hambat Terwujudnya MDGs



Ketua Panja MDGs BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Asegaf saat memimpin Rapat Panja.

Dua tahun lagi program MDGs (Millenium Development Goals) akan berakhir, namun Panja MDGs BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI menilai pemerintah belum sepenuhnya bisa menciptakan atau mewujudkan delapan butir kesepakatan MDGs yang telah disepakati sekitar 189 negara perwakilan PBB pada September 2000 silam.

Hal tersebut terungkap saat rapat Panja MDGs BKSAP DPR RI pada Rabu (3/7) di Jakarta. Menurut Anggota BKSAP yang sekaligus sebagai Ketua Panja MDGs, Nurhayati Ali Asegaf ada tiga butir MDGs yang belum terwujud dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut meliputi penurunan

angka kematian ibu melahirkan dan bayi, meningkatkan kesehatan ibu serta memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya.

“Seperti yang disampaikan Ibu Menteri Kesehatan tadi, bahwa Goals atau tujuan MDGs ke 4 dan 5 berupa menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi memang masih sangat sulit. Hal tersebut menurut Menkes karena mengingat letak geografis Indonesia yang begitu besar sehingga masih ada kendala yang dialami oleh pemerintah, terutama setelah berlakunya Otonomi Daerah, dimana daerah memiliki kekuasaan tersendiri dalam mengatur daerahnya masing-masing,” ungkap Nurhayati.

Meski demikian Nurhayati menilai, hal tersebut tidak serta merta dapat menjadi alasan pemerintah tidak bisa mencapai MDGs butir ke 4 dan 5. Karena menurut Nurhayati hal tersebut sudah merupakan amanat UUD 1945 dimana negara menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dikatakan Nurhayati, DPR RI juga sudah membuat panja MDGs sejak 2010, dimana setiap tahunnya DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ke depannya. Selain tentunya, melakukan pengawasan-pengawasan.

“Disini saya melihat belum tercapainya MDGs itu sendiri karena masih lemahnya sosialisasi. Bagaimana mungkin ada aparat Pemda tidak mengetahui apa itu MDGs. Sehingga kami menilai selama ini sepertinya sosialisasi yang dijalankan pemerintah untuk MDGs ini yang kurang tepat, sehingga ada hambatan komunikasi antara pusat dan daerah,” jelas Nurhayati.

Nurhayati berharap di waktu MDGs yang tinggal dua tahun lagi, pemerintah dapat mengejar ketertinggalan tersebut, terlebih lagi Indonesia akan menjadi *Co chair* dalam merumuskan Goals atau tujuan setelah berakhirnya MDGs ini pada 2015 mendatang. (Ayu) Foto: Rizka/Parle.





Ketua DPR RI Marzuki Ali menghadiri Pembukaan Pameran Islamic Book Fair (IBF) dan menerima IBF Award dari IKAPI Jakarta di Palembang, Senin (1/7). Foto: wahyu/Parle.



Penandatanganan naskah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI disaksikan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (4/7).foto:Iwan Armanias/parle.



Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam dan Wakil Ketua Budiman Sujatmiko saat memberi keterangan pers mengenai perkembangan RUU Desa di Press Room DPR RI, Kamis (4/7) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Rapat Panja MDGs (Millennium Development Goals) BKSAP DPR RI dipimpin Ketua Panja MDGs, Nurhayati Ali Aseggaf dihadiri Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Perwakilan Kementerian Luar Negeri, UKP PPP dan Bappenas di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (3/7) Foto: Rizka/Parle.